



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/cmfy4s54>

REDEFINISI KEWAJIBAN BELA NEGARA BAGI GENERASI Z MELALUI LITERASI DIGITAL DAN PENANGKALAN HATE SPEECH

Rizka Amelia Putri ^{a*}, Meiva Widiastanti ^b, Nasywa Hanifah Vita Putri ^c, Neza Amelia Agustina ^d,
Valenciana Dhepa Mezzaluna ^e, Suryo Ediyono ^f

^a Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; B02250362002@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^b Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; meivawt@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^c Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; nasywaputri772@uns.student.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^d Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; nezaamelia@uns.student.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^e Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; dhepamezzalunnay@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^f Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; ediyonosuryo@staff.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret; Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

* Penulis Korespondensi: Rizka Amelia Putri

ABSTRACT

The concept of state defense (bela negara) has traditionally been associated with physical and military defense. However, in the era of information disruption, threats to national sovereignty and unity have shifted to the digital realm, such as the spread of hate speech, misinformation, and provocative narratives that threaten social integration. This study aims to redefine the meaning and obligations of national defense, particularly for Generation Z as digital natives, and to explain the strategic role of digital literacy in countering hate speech on social media. Through a qualitative approach using a literature review based on credible sources, this study explores how digital literacy has become a primary instrument of national defense today. The findings indicate that national defense for Generation Z is no longer limited to taking up arms but involves using critical thinking, digital ethics, and technological skills to counter hate speech. Proficient digital literacy enables Generation Z to become producers of positive content and active agents of change in cyberspace. This study is expected to promote the strengthening of digital citizenship through active participation in filtering information, countering hate narratives, and disseminating positive content is a tangible manifestation of the duty of national defense in the digital age. The active engagement of Generation Z in the digital era is a crucial pillar for maintaining the stability and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia

Keywords: State Defense; Generation Z; Digital Literacy; Hate Speech; Digital Era

Abstrak

Konsep bela negara secara tradisional kerap dikaitkan dengan pertahanan fisik dan militer. Namun, di era disrupsi informasi, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa telah bertransformasi ke ranah digital, seperti penyebaran *hate speech*, hoaks, dan narasi provokatif yang mengancam integrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan makna dan kewajiban bela negara, khususnya bagi Generasi Z yang merupakan digital native, serta menjelaskan peran strategis literasi digital dalam menangkal ujaran kebencian di media sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang diperoleh melalui sumber-sumber kredibel, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana literasi digital menjadi instrumen utama pertahanan negara saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bela negara bagi Generasi Z tidak lagi sebatas mengangkat senjata, melainkan menggunakan daya kritis, etika digital, dan kecakapan teknologi untuk menangkal *hate speech*. Literasi digital yang mumpuni memungkinkan Generasi Z untuk menjadi produsen konten positif

dan agen perubahan yang aktif di ruang siber. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan kewarganegaraan digital melalui partisipasi aktif dalam menyaring informasi, melawan narasi kebencian, dan menyebarkan konten positif merupakan manifestasi nyata dari kewajiban bela negara di era digital. Keterlibatan aktif Generasi Z di era digital menjadi pilar krusial demi menjaga stabilitas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Bela Negara; Generasi Z; Literasi Digital; *Hate Speech*; Era Digital

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh tatanan peraturan perundang-undangan di dalamnya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila. Dalam kerangka hukum tersebut, bela negara dimanifestasikan sebagai kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap individu sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945, yang terletak di bawah Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Ketentuan ini menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar seluruh warga negara. Secara operasional, konsep bela negara ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang memberikan cakupan luas bahwa upaya pertahanan negara tidak terbatas pada aspek militer semata, melainkan mencakup upaya non-militer yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Partisipasi aktif dalam berbagai bidang ini menjadi indikator utama kesadaran berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, mandat konstitusional tersebut kini menghadapi tantangan kompleks akibat arus globalisasi. Menurut [26], perubahan tatanan global menciptakan ancaman baru yang dapat memengaruhi masa depan negara. Jika dahulu pertahanan negara Indonesia berfokus pada ancaman militer yang bersifat konvensional, kini ancaman tersebut telah bermutasi ke ranah non-fisik yang lebih sulit dideteksi.

Di tengah pergeseran medan perjuangan tersebut, ruang digital kini telah bertransformasi menjadi "rumah kedua" bagi Generasi Z, tempat mereka menghabiskan sebagian besar aktivitas dan interaksi sosial sehari-hari. Sayangnya, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dunia maya ini tidak dibarengi dengan kedewasaan dalam mengolah informasi. Celah inilah yang memicu ruang digital menjadi medan perjuangan baru yang rentan terhadap ujaran kebencian (*hate speech*), disinformasi, serta narasi destruktif yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak semata-mata datang dengan agresi fisik, melainkan juga dari manipulasi opini publik yang dapat merusak persatuan bangsa di ruang siber. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, fenomena ini tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah sosial biasa atau sekadar kenakalan digital, melainkan sebuah ancaman nyata yang terukur bagi keutuhan bangsa karena dapat merusak toleransi, memicu konflik horizontal di dunia nyata, dan memudarnya rasa persatuan di kalangan generasi muda.

Ancaman disintegrasi tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan literasi digital yang akut di tubuh Generasi Z. Meskipun mereka sangat mahir mengoperasikan teknologi sebagai *digital natives*, kemahiran teknis tersebut nyatanya tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi. Banyak dari mereka yang belum mampu membedakan antara data yang valid dengan opini provokatif atau hoaks. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang diduga menjadi sumber penyebaran informasi palsu. Pada tahun 2014 saja, sudah ada 761.126 situs yang diblokir karena memuat berita palsu. Pada tahun 2015, jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 766.394 situs. Menurut *The Jakarta Post*, sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah ada 144 orang yang diproses secara hukum karena kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu di media sosial [20]. Akibat ketidakcakapan ini, Generasi Z berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai korban manipulasi informasi maupun sebagai pelaku pasif yang memperluas jangkauan konflik di dunia maya.

Tanpa kemampuan literasi digital yang mumpuni, Generasi Z dengan mudah terjebak untuk ikut menyebarkan narasi kebencian tersebut hanya melalui fitur berbagi (*share*) tanpa memikirkan dampaknya. Sikap permisif dan minimnya etika digital ini pada akhirnya menciptakan efek domino yang berbahaya bagi negara. Menurut [13], meskipun Undang-Undang ITE telah menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku, penyebaran hoaks tetap tidak dapat dieliminasi secara total. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang perlu diambil adalah melalui edukasi intensif bagi pengguna media sosial agar mereka memiliki daya tangkal dan tidak menjadi korban manipulasi informasi. Tanpa mereka sadari, keterlibatan aktif maupun pasif

dalam memperluas ujaran kebencian di ruang digital ini justru sedang merapuhkan pertahanan non-militer bangsa dan melemahkan ketahanan nasional dari dalam.

Berdasarkan data lanskap digital [4], mayoritas aktivitas masyarakat kini berpusat pada konsumsi konten digital, di mana algoritma media sosial dirancang untuk memicu emosi. Akibatnya, berita yang kontroversial dan penuh kebencian jauh lebih cepat viral daripada fakta yang menyejukkan. Di sinilah integritas Gen Z diuji. Menjadi "tentara digital" bukan berarti menyerang balik dengan makian, melainkan dengan memproduksi konten positif, menyuarkan toleransi, dan berani bersikap skeptis sebelum mengeklik tombol *share* [2]. Kematangan digital seperti inilah yang akan menjadi tameng utama dalam menjaga stabilitas nasional di era informasi.

Melalui dasar pemikiran tersebut, artikel ini ditulis dengan urgensi tinggi untuk merumuskan sebuah paradigma bela negara yang modern dan sepenuhnya aplikatif bagi Generasi Z. Oleh karena itu, redefinisi bela negara menjadi urgensi agar konsep ini tetap relevan. Bela negara tidak lagi terbatas pada kesiapan fisik, melainkan menuntut keterlibatan aktif dalam menjaga integritas ruang informasi. Sejalan dengan pendapat [9], implementasi bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, bahkan melalui tindakan sederhana sehari-hari. Kini, literasi digital dan perlawanan terhadap *hate speech* adalah wujud nyata patriotisme modern. Adaptasi ini menempatkan generasi muda sebagai garda depan pertahanan siber untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap selaras dengan persatuan nasional. Tulisan ini tidak hadir untuk sekadar menambah deretan teori yang kaku di ruang akademik, melainkan dirancang sebagai panduan taktis bagi generasi muda untuk menavigasi ruang publik virtual secara sehat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggabungkan, membandingkan, dan mengolah kembali temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu agar menghasilkan pemahaman baru yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Hasnunidah (2017) dalam [22]. Subjek penelitian dalam studi ini difokuskan pada gagasan, tema-tema utama, serta kesimpulan kualitatif yang terdapat di dalam teks literatur yang dikaji. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, yang dikumpulkan melalui penelusuran berbagai pangkalan data jurnal ilmiah terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur relevan, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan nasional yang dipilih secara ketat berdasarkan kriteria tertentu, yaitu harus berupa artikel jurnal ilmiah berbasis riset kualitatif yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2016–2026), serta secara spesifik berfokus pada pertahanan negara. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kecenderungan pesan dalam sebuah komunikasi. Menurut pandangan Berelson dalam [25], metode ini mencakup pemeriksaan terhadap materi komunikasi lisan dan tulisan, baik yang dipublikasikan melalui media elektronik maupun cetak. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, reduksi data dengan mengklasifikasikan informasi yang berhubungan langsung dengan fenomena *hate speech* dan literasi digital; kedua, menyajikan data dalam bentuk uraian sistematis untuk memaparkan dinamika ancaman dan bentuk bela negara modern; serta ketiga, menarik kesimpulan guna merumuskan tesis mengenai peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa di dunia maya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Redefinisi Bela Negara di Era Digital

Tantangan geopolitik dan keamanan nasional pada abad ke-21 telah mengalami pergeseran fundamental. Konsep bela negara yang secara historis berakar pada pertahanan fisik dan militeristik, kini menghadapi urgensi rekonseptualisasi seiring dengan masifnya perkembangan teknologi informasi. Bela negara harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pada era modern abad ke-21 ini, konsep dan praktik bela negara kini telah bertransformasi total. Medan pertempuran saat ini didominasi oleh sektor non-militer, seperti persaingan di bidang teknologi, politik, ekonomi, ideologi, serta imperialisme budaya [24]. Bagi Generasi Z (lahir tahun 1997-2012), ruang siber bukan lagi sekadar instrumen komunikasi sekunder, melainkan telah menjadi ekosistem utama tempat mereka mengartikulasikan identitas, ekonomi, dan ruang sosial mereka [16]. Oleh karena itu, memaknai bela negara bagi generasi ini tidak dapat lagi disempitkan pada narasi "menangkat senjata" atau wajib militer, melainkan harus ditransformasikan menjadi aksi nyata penegakan kedaulatan bangsa.

Transformasi konsep bela negara tersebut tidak terlepas dari perkembangan paradigma keamanan yang mengalami pergeseran dari konsep keamanan tradisional menuju human security. Pada awalnya, keamanan dipahami secara sempit sebagai perlindungan wilayah negara dari ancaman eksternal, pengamanan kepentingan nasional, dan pertahanan terhadap agresi militer [30]. Namun, perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta munculnya berbagai ancaman nonmiliter mendorong perluasan makna keamanan yang tidak lagi hanya berorientasi pada negara, tetapi juga pada perlindungan individu dan masyarakat. Repez dan Postolache menjelaskan bahwa human security merupakan konsep yang menempatkan keamanan individu dan komunitas sebagai fokus utama dengan mengintegrasikan aspek hak asasi manusia dan pembangunan [31]. Sejalan dengan itu, UNDP menegaskan bahwa fokus keamanan yang tepat bukan hanya negara, melainkan individu sebagai subjek utama keamanan[30]. Keamanan manusia lahir dari pemahaman multidisipliner yang menempatkan keselamatan individu, kebebasan dasar, dan akses terhadap kesejahteraan sebagai elemen utama keamanan[32]. Oleh karena itu, redefinisi bela negara merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan karakter ancaman tersebut, di mana upaya menjaga kedaulatan bangsa tidak lagi hanya diwujudkan melalui pertahanan fisik, tetapi juga melalui penguatan literasi digital, ketahanan informasi, serta partisipasi aktif warga negara dalam menjaga ruang siber.

Secara yuridis, bela negara di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Karakteristik Generasi Z yang tumbuh bersama *smartphone* dan internet (*digital natives*) membuat mereka memiliki kerentanan sekaligus potensi yang besar. Upaya bela negara konvensional yang bercorak indoktrinasi *top-down* dinilai kurang efektif dan cenderung berjarak dengan realitas kehidupan mereka [15]. [19] menjelaskan dengan teori keamanan insani (*human security*), di mana kedaulatan negara kini tidak hanya bergantung pada penjagaan militer di perbatasan fisik, melainkan juga pada ketahanan warga negara di ruang siber, yang meliputi sektor informasi, budaya, dan ekonomi.

3.2. Literasi Digital sebagai Instrumen Utama Pertahanan Negara

Dalam konteks ancaman kontemporer, seperti perang informasi (*information warfare*), penetrasi ideologi transnasional, disinformasi terstruktur, hingga serangan siber pada infrastruktur kritis, warga negara adalah garda terdepan pertahanan non-fisik. [1] yang menegaskan bahwa dalam konteks bela negara, literasi digital berfungsi sebagai alat ampuh untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Bagi Generasi Z dan masyarakat digital secara umum, benteng pertahanan ini tidak dibangun dengan parit-parit perlindungan, melainkan melalui manifestasi instrumen utama, yakni penerapan literasi digital.

Penguasaan literasi digital tidak terbatas pada kemampuan teknis gawai, melainkan turut melibatkan aspek kognitif, sosial, dan etis. Oleh karena itu, generasi muda yang sangat rentan terhadap dampak arus informasi digital memerlukan pembekalan literasi yang utuh dan komprehensif. Tanpa kemampuan ini, masyarakat digital akan sangat rentan terhadap manipulasi psikologis yang dirancang untuk memecah belah persatuan bangsa [18]. Keterbukaan akses informasi yang dimiliki Generasi Z ternyata belum menjamin kelancaran partisipasi kewargaan mereka. Hambatan utama yang dihadapi generasi ini justru bersumber dari masifnya disinformasi serta ancaman polarisasi politik [7]. Salah satu bentuk ancaman non-fisik yang paling berbahaya di era siber adalah operasi psikologis digital. Aktor-aktor destabilisasi, baik domestik maupun asing kerap memanfaatkan algoritma media sosial yang berbasis *engagement* tinggi untuk menyebarkan narasi ketakutan, ujaran kebencian (*hate speech*), dan radikalisme, yang bertujuan untuk merusak ikatan sosial dan disintegrasi bangsa dari dalam.

Terlepas dari hambatan yang ada, pemanfaatan teknologi digital memberikan potensi signifikan bagi Generasi Z untuk meningkatkan partisipasi kewargaan mereka. Pada konteks inilah literasi digital memainkan peran krusial sebagai instrumen proteksi utama. Kemampuan literasi digital memberikan individu keterampilan untuk melakukan *cross-checking* terhadap sumber berita, mengenali karakteristik situs berita palsu, serta memahami motif di balik sebuah narasi politik di media sosial. Menjadikan literasi digital sebagai instrumen utama pertahanan non-fisik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis.

3.3. Peran Generasi Z sebagai Agen Perubahan: Literasi Digital sebagai Sarana Produksi Konten Positif dan Penangkalan Hate Speech

Generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dibesarkan di era yang sangat melekat dengan kemajuan teknologi digital [10]. Posisi demografis ini menempatkan mereka pada peran krusial dalam mengarahkan tren informasi dan kebudayaan digital di Indonesia.

Sebagai penggerak perubahan di dunia maya, Generasi Z dapat merealisasikan komitmen bela negara dengan cara memproduksi konten positif, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga etika dalam bermedia sosial. Upaya membagikan konten yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan toleransi ini menjadi instrumen penting untuk meredam narasi negatif yang berisiko memecah belah masyarakat [17].

Penguasaan literasi digital menjadi kebutuhan yang penting mengingat ruang digital tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga digunakan untuk menyebarkan propaganda, provokasi, radikalisme, dan ujaran kebencian. [14] menjelaskan bahwa media digital dapat dimanfaatkan untuk membangun pengaruh terhadap kelompok masyarakat tertentu sehingga kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi menjadi aspek yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital.

Sebagai kelompok yang aktif memanfaatkan media digital, Generasi Z memiliki potensi yang besar dalam memproduksi konten edukatif, kampanye literasi digital, promosi toleransi, serta penguatan identitas kebangsaan. Menurut [27], kompetensi digital yang memadai memungkinkan generasi muda memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat.

Produksi konten positif juga merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menangkal *hate speech*. Konten yang mengedepankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan persatuan dapat berfungsi sebagai kontra narasi terhadap penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Selain itu, literasi digital membantu Generasi Z mengidentifikasi konten bermuatan kebencian, melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menghindari keterlibatan dalam penyebaran konten diskriminatif [12].

3.4. Manifestasi Nyata Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Manifestasi nyata kewarganegaraan digital tercermin dalam penggunaan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang berlaku. [3] menjelaskan bahwa kewarganegaraan digital berperan dalam menciptakan keamanan digital melalui pemenuhan hak, kewajiban hukum, dan perlindungan warga digital dari berbagai risiko kejahatan siber. Oleh karena itu, bentuk nyata kewarganegaraan digital dapat diwujudkan melalui perlindungan data pribadi, penggunaan teknologi secara bijak, serta kepatuhan terhadap etika dan aturan di ruang digital.

Dalam bidang pendidikan, kewarganegaraan digital diwujudkan melalui pemahaman mengenai penggunaan teknologi yang etis, keamanan dan privasi digital, serta penghormatan terhadap hak cipta. [23] menjelaskan bahwa penguatan kewarganegaraan digital dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif, studi kasus, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta program pelatihan keterampilan digital dan kampanye keamanan daring. Selain itu, pengguna media digital perlu memahami hak dan tanggung jawab digital (*digital rights and responsibilities*), memiliki kemampuan menyaring informasi, serta menghindari perilaku yang merugikan orang lain di ruang digital [6].

Kewarganegaraan digital juga tercermin dalam kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merespons berbagai fenomena digital secara kritis, termasuk disinformasi, pelanggaran privasi, dan perundungan siber (*cyberbullying*) [28]. Praktik kewarganegaraan digital yang etis dan kritis sejatinya adalah wujud nyata dari pengamalan bela negara di era modern. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk turut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai ancaman nonmiliter di ruang digital, seperti hoaks, propaganda, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas sosial [5]. Setiap tindakan etis, seperti melindungi data pribadi dan menyaring informasi secara kritis, merepresentasikan peran strategis warga negara dalam membentengi kedaulatan bangsa. Dengan demikian, perilaku digital yang bijak adalah bentuk aktualisasi bela negara yang krusial untuk menjamin stabilitas dan keutuhan NKRI dari ancaman nonmiliter di era informasi.

Dalam konteks tersebut, Generasi Z memegang peran strategis sebagai garda terdepan kewarganegaraan digital. Manifestasi peran ini diwujudkan melalui kebiasaan menyaring informasi secara ketat, menolak penyebaran hoaks serta *hate speech*, menghargai perbedaan pendapat, dan memproduksi konten positif yang

bernapaskan nilai toleransi serta nasionalisme. Langkah-langkah ini merupakan bentuk nyata dalam mendukung ketahanan ruang siber dari ancaman disinformasi di era disrupsi.. Peran tersebut didukung oleh literasi digital yang mencakup kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasikan, dan menggunakan informasi secara kritis [11]. Dengan demikian, partisipasi aktif Generasi Z dalam menjaga kualitas ruang digital merupakan bentuk aktualisasi bela negara yang relevan dengan tantangan era digital [5].

3.5. Dampak terhadap NKRI

Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat dipengaruhi oleh redefinisi bela negara melalui penerapan literasi digital dan mitigasi ujaran kebencian (*hate speech*). Pada era kontemporer, dimensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa telah bertransformasi dari sekadar konfrontasi fisik menjadi ancaman nonmiliter. Bentuk ancaman baru ini meliputi persebaran hoaks, disinformasi, propaganda, serta ujaran kebencian di ruang siber yang secara nyata berisiko mengikis kohesi sosial dan memecah belah persatuan bangsa. [21] menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi dapat memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial serta mengganggu ketahanan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena penting dalam menjaga keutuhan bangsa.

Rendahnya literasi digital dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap berbagai informasi yang menyesatkan. [1] menjelaskan bahwa arus informasi global yang tidak tersaring dapat memicu penyebaran hoaks, teori konspirasi, dan keresahan sosial yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi. Jika kondisi ini dibiarkan, kerentanan tersebut akan bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi keutuhan NKRI, di mana ujaran kebencian dan polarisasi politik yang tidak dimitigasi dapat memicu konflik horizontal. Senada dengan hal tersebut, [1] menegaskan bahwa kecakapan literasi digital memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis dalam membedakan informasi yang dapat dipercaya dan yang tidak, sehingga menjadi perisai efektif dalam menangkal hoaks yang mengancam persatuan. Dengan penguasaan literasi digital yang mumpuni, risiko penyebaran disinformasi yang berpotensi merusak tatanan sosial dan stabilitas politik dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, mengabaikan literasi digital berarti membiarkan ruang publik digital terancam, yang secara langsung bertentangan dengan upaya bela negara dalam menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di era informasi.

Sebaliknya, penguatan literasi digital dan upaya penangkalan *hate speech* memberikan dampak positif terhadap penguatan ketahanan nasional. Kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi, menyaring konten digital, serta menolak penyebaran ujaran kebencian dapat mengurangi potensi konflik sosial dan polarisasi di masyarakat. Selain itu, [1] menjelaskan bahwa literasi digital juga mendorong terbentuknya komunitas digital yang memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong melalui penyebaran informasi yang kredibel dan bermanfaat.

Peran Generasi Z dalam memproduksi konten positif, menyebarkan narasi yang inklusif, serta menghormati keberagaman turut berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial digital. [8], aktivitas generasi muda di ruang digital dapat memperkuat solidaritas nasional melalui interaksi yang menjunjung nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan dan menjaga integrasi nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban bela negara telah mengalami pergeseran makna seiring berkembangnya tantangan pada era digital. Bela negara tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan kedaulatan melalui kekuatan fisik atau militer, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam menjaga ruang digital dari berbagai ancaman nonmiliter, seperti *hate speech*, hoaks, disinformasi, propaganda, serta berbagai bentuk manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu persatuan, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu aspek penting yang perlu dijaga bersama karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi ini sekaligus menempatkan Generasi Z sebagai kelompok yang memiliki posisi strategis karena karakteristiknya yang akrab dengan perkembangan teknologi dan media digital, sehingga berpotensi menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman informasi sekaligus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan bangsa melalui pemanfaatan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan perubahan tersebut, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa literasi digital merupakan elemen yang sangat penting dalam merealisasikan kewajiban bela negara di era digital. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai kredibilitas informasi, menerapkan etika dalam berinteraksi di ruang digital, melakukan verifikasi terhadap berbagai sumber informasi, serta memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab. Kompetensi tersebut menjadi modal utama bagi Generasi Z untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, mengurangi potensi konflik akibat ujaran kebencian, serta membangun budaya komunikasi yang lebih sehat dan inklusif. Penguatan literasi digital tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas individu dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjadi strategi yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan nasional, membangun budaya kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan redefinisi kewajiban bela negara tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi memerlukan dukungan berbagai pihak melalui penguatan pendidikan literasi digital, pembentukan karakter kewarganegaraan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai toleransi, nasionalisme, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan literasi digital sebagai bagian dari implementasi bela negara diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam menjaga persatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung terwujudnya masyarakat digital yang cerdas, beretika, dan berkontribusi terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rasona Sunara Akbar *et al.*, "Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital," *J. Pendidik. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 16, no. 2, pp. 253–261, 2024, doi: 10.37304/jpips.v16i2.17694.
- [2] O. C. Adabi and D. P. Asnanda, "Pengaruh literasi digital terhadap ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan disinformasi global pada pandemi COVID-19," vol. 3, no. 1, pp. 1097–1107, 2026.
- [3] M. Alfazri and J. Syahputra, "Literasi digital dan etika komunikasi dalam konteks media sosial," vol. 4, pp. 50–62, 2024.
- [4] R. Alinata, E. Susanti, W. A. Sari, S. Dinillah, Nurfadilah, and D. N. Sofi, "Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, 2024, doi: 10.61476/d0n6cg11.
- [5] N. Aminudin, N. Hidayat, D. Feriyanto, D. Septasari, and I. Awaliyani, "Digital landscape and behavior in Indonesia 2024: A national survey analysis of internet penetration, cybersecurity risks, and user segmentation using K-Means clustering and logistic regression," *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, vol. 6, no. 5, pp. 3336–3351, 2025, doi: 10.52436/1.jutif.2025.6.5.5117.
- [6] C. Citanindya and T. P. Sirrullah, "Literasi digital dan bela negara: Resiliensi generasi Z terhadap ancaman non-militer dalam perspektif kebangsaan," vol. 2, no. 2, pp. 44–52, 2025.
- [7] E. P. Febrilio, A. P. Wibowo, and B. Budiono, "Konsep dan implementasi digital citizenship education di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Malang," *Academy of Education Journal*, vol. 15, no. 1, pp. 531–542, 2024, doi: 10.47200/aoej.v15i1.2237.
- [8] F. Putri, Susiba, K. Andila, N. Anita, and Q. Febriyanti, "Penguatan civic engagement generasi Z melalui pendidikan kewarganegaraan," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, vol. 3, no. 2, pp. 167–176, 2025, doi: 10.59581/garuda.v3i2.5119.
- [9] Z. Hasan and A. Iqbal, "Peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI di era digital," vol. 2, pp. 31–44, 2025.
- [10] Karim and S. Widayati, "Membangun kesadaran mahasiswa dalam bela negara untuk mewujudkan ketahanan nasional," *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, vol. 12, no. 2, p. 1, 2024, doi: 10.61689/waspada.v12i2.600.
- [11] Karimatunnisa, "Implementasi bela negara bagi generasi Z di era digital dalam bingkai nilai-nilai Pancasila," vol. 3, no. 3, pp. 1276–1287, 2026.
- [12] B. B. Kurniadi, P. Bukit, M. Tamba, and E. Modesta, "Kompetensi siswa literasi digital pembelajaran daring," *Academy of Education Journal*, vol. 14, no. 1, pp. 155–170, 2023.

- [13] Mahardika, "Cara cerdas bela negara di era digital," ITS News, 2020. [Online]. Available: <https://www.its.ac.id/news/cara-cerdas-bela-negara-di-era-digital/>
- [14] M. T. Palupi, "Hoax pemanfaatannya sebagai bahan edukasi di era literasi digital dalam pembentukan karakter generasi muda," *Jurnal Skripta*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [15] M. M. Nasoha, N. R. Putri, Y. R. A. R, R. N. Aslami, and A. R. A. Zahra, "Analisis kritis peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah cyber radicalism di kalangan Gen Z," *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 5, pp. 658–674, 2025.
- [16] S. O. L. Ramadhania, D. Sulistyawati, and M. An-nisa Rohmawatun, "Revitalisasi pendidikan Pancasila untuk generasi Z: Antara literasi digital dan identitas kebangsaan," vol. 2, no. 5, pp. 843–860, 2025.
- [17] D. A. Praharani and T. Sukmayadi, "Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk kepribadian Gen Z di era 5.0," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 2, pp. 66–74, 2023, doi: 10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p66-74.
- [18] H. Prasetya, "Upaya bela negara generasi Z berbasis pengembangan media sosial," *Jurnal Kebangsaan*, vol. 1, no. 1, pp. 10–20, 2020.
- [19] P. R. Rangkutiy et al., "Peran literasi digital dalam mencegah kejahatan siber di kalangan generasi muda," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 1, no. 4, pp. 1116–1127, 2025.
- [20] Rizkyta and N. Z. Al Jannah, "Book review: Hara, A.E., Indriastuti, S., & Trihartono, A. (2023). Keamanan insani (human security): Eksplorasi berbagai perspektif di dunia," *Journal of Urban Sociology*, vol. 1, no. 1, p. 67, 2024, doi: 10.30742/jus.v1i1.3549.
- [21] R. Sabrina, "Literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoax," *Communicare: Journal of Communication Studies*, vol. 5, no. 2, p. 31, 2019, doi: 10.37535/101005220183.
- [22] Sarjito, "Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, vol. 6, no. 2, pp. 175–186, 2024, doi: 10.47650/jglp.v6i2.1547.
- [23] N. Septiana, Z. Khoiriyah, Shaleh, and U. S. Kalijaga, "Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif," *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1, pp. 1–15, 2021.
- [24] R. D. Setyawan, M. Hijran, and Rozi, "Implementasi digital citizenship untuk kalangan Gen Z mahasiswa pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan," vol. 11, no. 2, 2023.
- [25] Subagyo, "Rencana aksi nasional bela negara: Perspektif pemerintah daerah," *Jurnal Academia Praja*, vol. 2, no. 1, pp. 1–16, 2019.
- [26] Sumarno, "Analisis isi dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra," *Jurnal Elsa*, vol. 18, no. 2, p. 55, 2020.
- [27] Tambun, L. Erfina, S. B. Surbakti, and Y. Padang, "Bentuk-bentuk implementasi bela negara oleh generasi muda dalam era globalisasi," *Journal of Samudra Social Studies Research*, vol. 3, no. 1, pp. 89–99, 2025, doi: 10.33059/jj.xxxx.xxxx.
- [28] H. A. Ummah and A. Kurniawan, "Literasi digital dan peran strategis net generation dalam membangun konten positif di media sosial," 2020.
- [29] T. Wijayanti, M. Masrukhi, and H. Irawan, "Implementasi pendekatan deep learning melalui model digital citizenship character habituation," *Wahana Sekolah Dasar*, vol. 33, no. 2, pp. 129–144, 2025.
- [30] United Nations Development Program (UNDP) (1994). Human Development Report, New Dimensions of Human Security, Oxford University Press.
- [31] Repez F, Postolache M. (2012). Violence and Traffic Accidents-Threats to Human Security: Carol National Defence University. Romania Military Thinking
- [32] Apriliani, D., & Rahmat, T. (2023). Keamanan manusia dalam perspektif studi keamanan kritis (Critical Security Studies): Studi kasus “Peranan ASEAN’s Political Security Community (APSC) dalam pemberantasan human trafficking”. *Global Mind*, 5(1), 13